

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Balai Diklat Keagamaan Surabaya

a) Sejarah Singkat

Berdasarkan KMA. No. 18/1978 tanggal 6 Maret 1978 dengan persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. B 251/I/MENPAN/3/1978 tanggal 6 Maret 1978, maka didirikanlah Balai Penataran Guru Agama (BPGA) sebanyak 6 Balai yang tersebar di 6 propinsi untuk seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah BPGA di Surabaya yang mewakili Indonesia bagian Timur yang terletak di Jl. Ngagel Jaya Utara 84 Surabaya.

Berdasarkan KMA No. 45/1981 tanggal 23 Mei 1981 diperkuat dengan KEPMENPAN No. B 504/MENPAN/5/1981 tahun 1981 sekaligus mencabut KMA No. 18 Tahun 1978 maka ditetapkan pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama yang tersebar di 12 kota, salah satunya sebagai pengganti BPGA Surabaya yang sejak 1986 bertempat di Jl. Juanda 2 Surabaya hingga pendidikan dan pelatihan tahun 2001.

Sejak tahun 2001-2002 bersamaan dengan kepindahan ke Jl. Ketintang Madya, Balai Diklat pernah menempati Wisma Sejahtera karena saat itu kampus Ketintang yang merupakan hasil

tukar guling dengan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur masih dalam tahap renovasi. Baru sejak tahun 2003 Balai Diklat Keagamaan menempati lahan tersebut. Berdasarkan KMA No. 345 tahun 2004 Balai Diklat Pegawai Teknis Surabaya berubah nomenklatur menjadi Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

b) Visi

“Terwujudnya SDM Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Yang Kompeten”

Misi

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan berwibawa
2. Mengembangkan penyelenggaraan diklat berbasis mutu dan nilai-nilai spiritual keagamaan
3. Meningkatkan profesionalisme widyaiswara dan tenaga kediklatan
4. Menyediakan sarana prasarana diklat yang memadai
5. Memperluas jaringan dan kerja sama dengan stakeholder

c) Tugas dan Fungsi

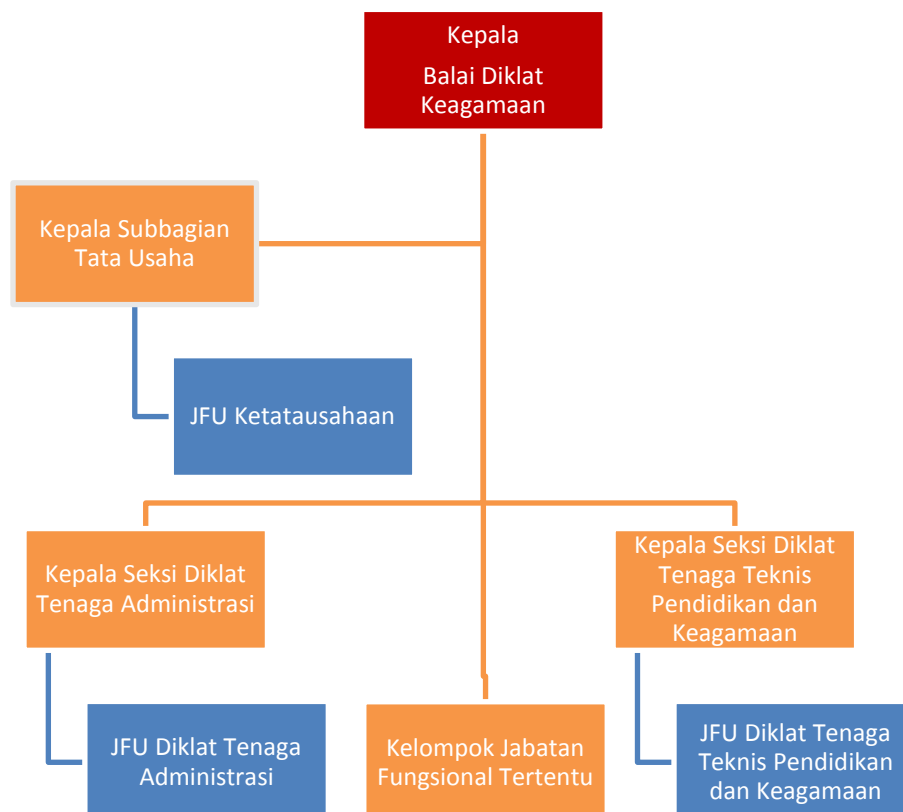
Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI. Balai Diklat Keagamaan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Diklat Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program diklat;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan.

d) Struktur Organisasi Balai Diklat Keagamaan Surabaya.



2. Merancang program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya?

Dalam hal ini ada beberapa cara dalam merancang pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Dengan melakukan AKD (analisis kebutuhan diklat) dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan saker pengguna diklat disitu kita ajak bicara kira-kira kebutuhan diklat apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing daerah sehingga kita rekap kemudian kita jadikan program untuk tahun berikutnya, sehingga diklat itu betul-betul sesuai kebutuhan *user* tidak sembarangan tapi betul-betul dibutuhkan oleh *user* karena adanya *gap* kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi secara nyata”.¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan beliau mengatakan:

Tabel 4.1

UPT & Sasaran Kinerja

NO	UPT	Tempat Pelaksanaan	Sasaran Objek Kinerja
1	UPT Balai Diklat Keagamaan Surabaya	Jawa Timur	PNS/NON PNS

Sumber : Diambil dari wawancara dengan bapak Aziz Fuadi S. SOS. M. S. M

¹Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

Tabel 4.2

NO	Kinerja	Sasaran Kinerja
1	Planing	Dalam perencanaan diklat ada proses analisis kebutuhan diklat (AKD). Analisis kebutuhan diklat fungsinya untuk memperoleh gambaran tentang diklat apa yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk melaksanakan analisis kebutuhan diklat dengan penggalian data melalui instrumen, wawancara, dan rapat kordinasi yang dihadiri oleh para stakeholder untuk membicarakan diklat-diklat apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. setelah diperoleh diklat apa yang akan dilaksanakan maka akan dibuat anggaran dan diajukan ke Biro perencana Kementerian Agama di Jakarta.
2	Organizing	Proses pengaturan tugas, tanggung jawab dari setiap individu di Balai Diklat Keagamaan Surabaya ada: 1. Panitia Penyelenggara: Panitia-panitia yang menyelenggarakan pelatihan. 2. Pengelola Diklat: Panitia yang mempersiapkan semua kebutuhan diklat. Seperti kesiapan sarana dan prasarana. 3. Widiaiswara : Orang yang menyampaikan materi pelatihan.
3	Actuating	Dalam pelaksanaan diklat akan diawali dengan rapat persiapan diklat. Rapat persiapan diklat ini di ikuti oleh panitia penyelenggara, pengelola diklat dan widia iswara. Dalam rapat tersebut akan membahas tentang penyusunan jadwal kegiatan, menentukan narasumber dengan kompetensi dan mata diklatnya, dan kesiapan dari sarana dan prasarana.

Sumber : Diambil dari wawancara dengan bapak Aziz Fuadi S. SOS. M. S. M

Tabel 4.3

Rancangan Program pelatihan

NO	Kegiatan/Program	Tanggal Pelaksanaan
1	Diklat Pengelolaan Perpustakaan Madrasah	4-9 pebr 2019
2	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja	4-9 pebr 2019
3	Diklat Pengelolaan Keuangan Madrasah	11-16 Maret 2019
4	Diklat Revolusi Mental ASN Angk.I	11-16 Maret 2019

5	Diklat Revolusi Mental ASN Angk.II	25 Feb-2 Mar 2019
6	Diklat Revolusi Mental ASN Angk.III	25 Feb-2 Mar 2019
7	Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	18-23 Maret 2019
8	Diklat pengelolaan UNBK MA bg Proktor	18-23 Maret 2019
9	Diklat pengelolaan UNBK MA bg Teknisi	1-7 April 2019

Sumber : Diambil dari dokumen kelembagaan

Tabel 4.4

Pengeluaran Kegiatan Diklat

NO	Kegiatan/Program	Anggaran
1	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	Rp. 1.286.035.000,-
2	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	Rp. 2.036.650.000,-
3	Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	Rp. 3.944.820.000,-
4	Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	Rp. 10.502.963.000,-
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	Rp. 12.960.899.000,-

Sumber : Diambil dari dokumen kelembagaan

Nah khusus balai diklat keagamaan surabaya itu karena tugasnya mendidik dan melatih tadi. Untuk ASN kementerian agama di lingkungan Jawa timur bagaimana cara merancangnya jadi sebelum pelaksanaan diklat itu ada proses perencanaan diklat. Jadi menurut manajemen kan ada proses *planning, orgaizing, actuating, dan controlling*. Dan bagaimana cara merencanakan itu pada taraf perencanaan diklat jadi di perencanaan diklat itu ada proses-proses meliputi pertama, analisis kebutuhan diklat. Analisis kebutuhan diklat itu fungsinya untuk memperoleh gambaran atau untuk memperoleh sebuah analisis tentang diklat-diklat apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Pegawai-pegawai dari stakeholder tadi itu yang diklat oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, untuk merancang diklatnya tadi perlu analisis kebutuhan diklat. Jadi pada tahapan analisis kebutuhan diklat itu ketika melakukan survei pada stakeholder diklat-diklat apa yang dibutuhkan oleh mereka baik yang mendesak maupun yang tidak mendesak. Jadi diklat apa yang dibutuhkan mereka itu kita cari informasi dulu, kita cari datanya dulu ke daerah. Jadi tiap tahun ada acara atau kegiatan Balai Diklat Keagamaan Surabaya bertujuan analisis kebutuhan diklat. Jadi analisis itu dari apa itu survei yang telah dilakukan dan penggalan data ke seluruh stakeholder jadi akan dapat kita revisi ulang diklat-diklat apa saja yang dibutuhkan untuk Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Ketika diperoleh diklat-diklat apa saja yang akan dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya satu tahun mendatang maka akan dibuat anggarannya, diajukan anggarannya. Setelah disetujui oleh DPR maka keluarlah anggaran masing-masing unit kerja di kementerian agama termasuk Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Anggarannya berapa yang keluar, kegiatan yang di setujui berapa, anggarannya berapa, itu baru keluar. Akhirnya setelah ada anggaran lalu Balai Diklat Keagamaan Surabaya itu melaksanakan kegiatan”.²

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE.

M.A.Bselaku perencana muda beliau mengatakan:

“Program pelatihan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan diklat dari para stakeholder atau pengguna hasil pelatihan”.³

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa dalam merancang program pelatihan harus melakukan analisis kebutuhan diklat dari para *stakeholder*. Analisis kebutuhan diklat. Fungsinya untuk memperoleh gambaran atau untuk

²Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

³Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku Perencana Muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

memperoleh sebuah analisis tentang diklat-diklat apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Sedangkan mengenai langkah apa saja yang digunakan oleh bapak dalam merancang program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Yang pertama adalah sarana prasarana jadi baik secara kuantitas maupun kualitas sarannya harus memenuhi kemudian ketersediaan narasumber atau widiaiswara kemudian penyelenggara diklat ketersediaan penyelenggara diklat/panitia kemudian perlengkapan diklat termasuk kebutuhan peserta, ATK atau sebagainya harus kita rancang juga kemudian sudah adanya pedoman atau panduan penyelenggaraan diklat nah ini dari pusat atau dari pusdiklat kementerian agama Jakarta kalau pedoman ini kita mengacu pada pedoman dari pusdiklat kementerian agama Jakarta termasuk sains dan kurikulumnya kurikulum silabinya itu dari sana karena disini adalah UPT. Untuk mengacu pada pusat semua kemudian ketersediaan anggaran”⁴.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan beliau mengatakan:

“Rancangan pelatihan itu terdiri dari rancangan diklat atau rancangan pelatihan yang akan dilakukan. Terus rancangan anggaran, setelah itu untuk kurikulum dan silabusnya itu sudah event sudah di proses jadi setelah itu kita tidak merancang lagi kita tinggal melaksanakan. Ketika sudah ada anggaran yang keluar, kurikulumnya sudah ada tujuannya sudah jelas, kita tinggal merencanakan waktunya kapan. Saatnya kapan itu di tentukan oleh banyaknya jenis kegiatan yang ada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dan

⁴Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

melihatnya urgensi atau pentingnya kegiatan tersebut bila dilaksanakan lebih awal. Jadi kalo kegiatannya ini mendesak harus dilaksanakan lebih awal. Mendesaknya karena apa? Misalkan, ada peraturan pemerintah yang segera mengharuskan untuk pelaksanaan diklat tersebut seperti diklat penyuluh agama non PNS, ada juga penyuluhan diklat agama. Jadi lihat urgensinya, lihat kepentingannya, lihat lebih penting yang mana dulu, yang penting harus didahulukan untuk dilaksanakan. Itu dari segi waktunya kalo dari segi mata pelajaran terus dari pelatihannya berapa lama itu sudah ada di kurikulum dan silabus dari diklat masing-masing.⁵

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Mengadakan kegiatan rakor (rapat koordinasi) sebagai salah satu analisis kebutuhan diklat”.⁶

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa dalam merancang program pelatihan kita harus melihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan narasumber/widiaiswara, dan anggaran yang ada.

Sedangkan mengenai apa saja yang menjadi prioritas atau nilai penting dalam merancang program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

⁵Wawancara dengan Bapak AzizFuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

⁶Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

“Kita mengacu dari analisis kebutuhan diklat, nah disitu mana dari angket yang dipilih dari pimpinan *stakeholder* terbanyak kita jadikan sebagai prioritas. Jadi dari sekian pimpinan *stakeholder* jumlahnya berapa, seandainya ada 40 orang kira-kira yang memilih diklat A berapa orang, diklat berapa orang kebutuhannya nah mana yang terbanyak untuk memilih itu ya otomatis itu yang dibutuhkan atau prioritas”.⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaanbeliau mengatakan:

“Didalam perencanaan diklat itu ada perencanaan diklat jenis apa. Anggaran biaya berapa dan perencanaan pelaksanaan sendiri. Misalkan sudah anggaran sudah ada silabus, sudah ada jenis diklat maka kita merencanakan pelaksanaan diklat, pelaksanaan diklatnya kapan itu tergantung dari urgensinya tadi itu ya. Setelah itu proses diklatnya ada proses pemanggilan peserta, nanti ada proses registrasi peserta, ada proses pembelajaran dan ada proses evaluasi.

Jadi rangkaian diklat itu setelah tadi proses perencanaan awal ada proses perencanaan pada saat pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan itu ada proses pemanggilan peserta, ada proses cek in. Selanjutnya proses pelaksanaan atau proses pembelajaran dan proses evaluasi diklat yang penting yaitu proses-proses semua itu penting dan unsur penting yang menentukan kualitas diklat itu adalah pertama adanya pengelola diklat kedua, penyenggara diklat, ketiga ada pengajar atau widiaiswara, keempat sarana dan prasarana, kelima peserta. Itu adalah point-point penting yang dibutuhkan oleh lembaga diklat atau diperhatikan oleh lembaga diklat agar kediklatannya itu bermutu.”⁸

⁷Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

⁸Wawancara dengan Bapak AzizFuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Yang menjadi prioritas yaitu jenis pelatihan yang benar-benar dibutuhkan para stakeholder yang sesuai jenis dari pusat”.⁹

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa yang menjadi prioritas dalam merancang program pelatihan adalah pelatihan yang benar-benar dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Sedangkan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam merancang program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Ada, yang pertama yang terlibat itu pimpinan kemudian widiaiswara atau narasumber atau WI kemudian perencana anggaran”.¹⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan beliau mengatakan:

⁹Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

¹⁰Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

“Yang merancang kegiatan diklat itu ada dari pihak kita sendiri dari pihak Balai Diklat Keagamaan Surabaya itu semua dari unsur-unsur entah dari pengawai ada pimpinan, itu semua terlibat dalam perancangan program diklat ketika ada kegiatan analisis kebutuhan diklat atau ada acara rapat koordinasi diklat dari situ kan dari kedua kegiatan itu muncul program diklat yang akan dilaksanakan. Jadi kalau setelah diklatnya tadi pelaksanaannya kapan terus yang melaksanakan siapa, itu juga yang terlibat itu panitia penyelenggara dan pengelola terlibat juga widiaisuara, jadi rapat untuk rapat penyelenggaraan diklat itu ada rapat penyelenggara diklat sebelum diklat dilaksanakan”.¹¹

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Ada, antara lain Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kasubag TU, Kasi diklat ADM, dan Kasi diklat tenaga teknis, perencana dan koordinator QI dari hasil analisis kebutuhan diklat kesemua stakeholder”.¹²

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam merancang program pelatihan adalah kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, widiaiswara, kasubag TU, kasi diklat ADM, kasi diklat tenaga teknis, dan lain-lain.

Sedangkan mengenai penghambat dalam merancang program pelatihan serta bagaimana cara mengatasi hambatan

¹¹Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

¹²Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Ada, kadang kala kita merancang program itu sesuai dengan kebutuhan pengguna diklat atau user tetapi faktanya kadang-kadang pedoman dan kurikulum dari pusat belum terbit atau belum ada sehingga kami harus menunda program itu untuk tahun berikutnya kita mengusulkan dulu ke pusat supaya diprogramkan buat desain kurikulum seperti ini”.¹³

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaan beliau mengatakan:

“Untuk selama ini hambatannya itu tidak ada namun kalau hambatan biasanya itu bukan dalam perancangan program diklat namun pelaksanaan diklat kalau untuk program perancangan diklat gampang tinggal kita mengajarkan apa itu analisis kebutuhan diklat, dianalisis kebutuhan diklat juga tidak ada soalnya bisa dianalisis, terus ada rapat koordinasi kediklatan yang memunculkan beberapa diklat beberapa itu termasuk proses perancangan diklat dan proses perancangan pelaksanaan diklatnya nanti bulan apa terus yang melaksanakan siapa memang relatif tidak ada hambatan namanya biasanya hambatannya kalau untuk pelaksanaan diklatnya”.¹⁴

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Ada, antara lain jenis pelatihan yang dibutuhkan *stakeholder* belum ada konsulnya dari pusat. Kadangkala bertentangan antara kepentingan pengajar. Dalam hal ini

¹³Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

¹⁴Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

widiaiswara dengan jenis pelatihan yang akan diselenggarakan kemudian anggaran juga terbatas”.¹⁵

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa yang menjadi penghambat dalam merancang program pelatihan diklat pelatihan yang dibutuhkan belum ada konsulnya dari pusat, bertentangan dengan kepentingan pengajar, dan anggaran yang terbatas.

3. Melaksanakan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya?

Dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan Surabaya dalam melaksanakan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Kita sebelum melaksanakan program pelatihan tentunya kita ada rapat persiapan dulu mas, rapat persiapan itu tentunya melibatkan pimpinan, widiaiswara, narasumber dan panitia. Dalam rangka menyusun jadwal kegiatan, kemudian menentukan narasumber yang sesuai dengan kompetensi dan mata diklatnya kemudian kesiapan sarana dan prasarannya harus sesuai harus *representatif*lah”.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

¹⁶Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaan beliau mengatakan:

“Cara pelaksanaannya tadi yaitu ketika sudah ada perencanaan diklat maka kita mulai untuk rapat-rapat. Pertama diawali rapat persiapan diklat. Rapat persiapan diklat ini diikuti oleh panitia penyelenggara, pengelola diklat dan widiaiswara. Jadi kalau untuk diklat yang di adakan di balai diklat itu untuk persiapannya hanya itu yang terlibat. Nanti dari rapat persiapan diklat itu ada pembahasan tentang siapa saja yang mengajar disitu. Ada juga pembahasan tentang panitia itu menangani apa saja, panitia siapa yang menangani setiap tahapan pelaksanaan diklat. Misalkan nanti yang menangani registrasi peserta siapa, nanti yang berada di kelas siapa, nanti yang menangani administrasinya siapa, seperti pembuatan absen dan laporan itu siapa itu semua dibagi-bagi pembagiannya itu di dalam tahap persiapan diklat”.¹⁷

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B perencana muda beliau mengatakan:

“Pelaksanaan program pelatihan didasarkan pada tipe anggaran yang sudah disetujui oleh pusat”.¹⁸

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa sebelum melaksanakan program pelatihan harus melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu.

Sedangkan mengenai apa saja yang dibutuhkan dan sering dibutuhkan dalam melaksanakan program pelatihankeahlian

¹⁷Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

¹⁸Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Sarana dan prasarana termasuk ya... ruang kelas, perlengkapan media pembelajaran, kalo anggaran ya sudah pasti anggaran diklat ya harus ada, kalo gak ada anggarannya gak bisa jalan”.¹⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaan beliau mengatakan:

“Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat ya unsur-unsur yang penting, unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan diklat tadi. Contohnya pengelolaan diklat, panitia penyelenggara, widiaiswara, sarana dan prasarana, yang dibutuhkan terus ada peserta. Itu yang dibutuhkan dalam diklat. Sedangkan dalam proses pembelajarannya ada kurikulum dan silabus itu tadi jadi kalau yang dibutuhkan semua itu dibutuhkan terus misalkan sarana dan prasarana termasuk apa? Termasuk didalamnya itu baik sarana prasarana baik di dalam maupun diluar kelas juga sarana dan prasarana *catering* jadi konsumennya itu harus dibutuhkan juga itu termasuk sarana dan prasarana. Sedangkan untuk panitia penyelenggara mereka juga dibutuhkan agar pelaksanaan kediklatan itu sesuai dengan tujuan yang ada yaitu begitu juga dengan widiaiswaranya kita harus mengajar dengan kompeten maka ketika mengajarnya

¹⁹Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

kompeten maka kembali lagi ke tadi maka di diklatnya bisa berjalan”.²⁰

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Yang sering dibutuhkan disini dalam melaksanakan program pelatihan adalah anggaran”.²¹

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa yang sering dibutuhkan dalam melaksanakan program pelatihan adalah anggaran, widiaiswara, dan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perlengkapan media, dan lain-lain.

Sedangkan mengenai kendala dalam pelaksanaan program pelatihan dan bagaimana cara menutupi kendala. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Pada saat pelaksanaan program kediklatan kadang-kadang ada pihak narasumber terutama narasumber yang dari luar itu kadang kala tidak bisa hadir sesuai jadwal sehingga kami harus menggantikan dengan narasumber yang sesuai dengan mata diklatnya, kalau yang lain gak ada, kalau sarana prasarana, kurikulum, gak ada yang sering ya.. itu narasumber tiba-tiba gak bisa hadir itu yang membuat sering, bermasalah itu sehingga menggantikan secara mendadak untuk mencari penggantinya yang sesuai kalau kita punya narasumber yang sesuai mengambil dari dalam kalau gak ada ya tetap mengambil dari luar, seperti diklat keuangan nah kadang kala kita tidak punya keahlian itu maka kita mengambil dari KPPN (Kantor

²⁰Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

²¹Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

Pelayanan Perbendaharaan Negara) misalnya kita mengambil dari perpajakan”.²²

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaan beliau mengatakan:

“Biasanya kalau dalam pelaksanaan diklat itu. Pertama ada kendala tentang pengajar misalnya gini kita sudah merencanakan untuk pengajar misalkan pak Ahmad ya, pak Ahmad mengajar bahasa indonesia pada tanggal misalkan nanti pada tanggal 20 Mei ternyata 20 Mei itu pak Ahmad harus diklat, diklat ke Jakarta. Jadi itu sebuah kendala. Kendalanya itu adalah adanya tugas yang double ketika widiaiswara itu direncanakan untuk mengajar. Sehingga solusinya adalah mengganti adalah mengganti dengan widiaiswara yang lain yang kompeten, kompeten di bidangnya misalkan diklat bahasa indonesia ya harus kompeten di bidang bahasa indonesia. Ketika misalkan tidak ada widiaiswara yang kompeten di bahasa indonesia semua sudah kepekek gitu, maka kita mengambil narasumber dari luar misalkan dari UNESA dosen UINSA gitu itu untuk kita undang kesini kita kasih surat permintaan pengajar jadi kita undang nanti kita beri honor sesuai dengan jam pelajaran dan sesuai dengan tarif pemerintah”.²³

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Keterbatasan anggaran kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan anggaran yang ada”.²⁴

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa kendala dalam melaksanakan program pelatihan terletak pada

²²Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

²³Wawancara dengan Bapak AzizFuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

²⁴Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

anggaran yang sangat terbatas, juga terletak pada pengajar atau widiaiswara yang kadang kala tidak datang untuk mengisi pelatihan.

Sedangkan mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“SDM, dari sisi SDM kita sudah memadai dari narasumber cukup, panitia penyelenggara sudah cukup terus dari widiaiswara dari segi pendidikannya sudah memadai banyak yang berpendidikan. Dan dari sarana prasarana sudah ada karna disini sudah tersedia semua. Wes dua itu aja mas SDM dan sarana dan prasarana”.²⁵

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaan beliau mengatakan:

“Faktor pendukungnya itu banyak sekali faktor pendukung dalam pelaksanaan diklat itu pertama, pelaksanaan diklat itu disamping faktornya ada kompetensi dari panitia penyelenggara, kedua kompetensi dari pengelola diklat, ketiga kompetensi dari pengajar terus setelah itu motivasi dari peserta. Motivasi dari peserta itu juga penting karena tanpa adanya motivasi dari peserta maka pelaksanaan diklat nanti akan menghasilkan diklat yang kurang bermutu serta pesertanya tidak termotivasi untuk belajar.

²⁵Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

Disamping itu juga tadi kompetensi pengelola diklat. Misalkan pengelola diklatnya kurang bagus atau kurang kompeten maka dia tidak mampu menangani diklat dengan baik demikian juga dengan pengelola diklat ketika pengelola diklatnya itu kurang kompeten atau misalkan merancang kediklatan tidak sesuai atau mereka kurang mempunyai kepekaan-kepekaan. Setelah itu kompetensi widiaiswara juga gitu itu yang juga jadi faktor pendukung terlaksananya diklat dengan baik. Kalau widiaiswara kurang kompeten maka diklatnya juga kurang bermutu. Terus kurikulum dan silabus yang disebut oleh pusat itu juga harus sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi faktor pendukungnya kita mempunyai pandangan kedepan atau sisi kedepan dan mengikuti perkembangan zaman agar diklat-diklat yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.²⁶

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE.

M.A.B selaku perencana mudabeliau mengatakan:

“Faktor pendukung disini dalam pelaksanaan program pelatihan ada manajemen, pengajar, peserta, dan anggaran”.²⁷

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelatihan adalah manajemen, pengajar, peserta, anggaran, dan lain sebagainya.

Sedangkan mengenai lebih banyak mana antara faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

²⁶Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selakuPenyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

²⁷Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Faktor pendukung mas, alasannya ya memang kita faktanya seperti itu jadi fakta di lapangan kita BDK surabaya ini sudah sangat apa ya...sangat bagus dalam hal untuk melaksanakan program kediklatan baik dari sisi sarana prasarana, SDM sangat cukup sehingga hambatan itu bisa terkendalikan atau bisa diminimalisir lah untuk lebih sedikit”.²⁸

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaanbeliau mengatakan:

“Kalau lebih banyak faktor penghambat ya diklat tidak bisa dilaksanakan. Jadi faktor pendukungnya itu pastinya lebih banyak paling penghambatnya itu biasanya selain masalah terus juga ada aturan pemerintah yang mengurangi anggaran-anggaran pelaksanaan diklat. Jadi kita tidak bisa ini atau kayak kemaren untuk menghadapi Covid-19 kan anggaran pemerintah itu di potong. Nah itu termasuk hambatan jadi kita tidak bisa melaksanakan program yang sudah kita tetapkan. Karena anggaran dari pemerintah itu dikurangi atau tidak dilaksanakan yang awalnya mau melaksanakan namun tidak bisa melaksanakan karena aturan pemerintah yang mengurangi anggaran pelaksanaan diklat. Itu termasuk sisi yang menghambat kalau kondisi yang menghambat lainnya itu masalah teknis tadi itu kalau menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Itu lingkungan eksternal namanya ya kayak peraturan pemerintah yang mengurangi anggaran diklat atau di dalam pelaksanaan diklatnya itu hambatannya itu tadi ada peserta yang dikirim tidak sesuai dengan persyaratan terus widiaiswara ketika bertugas mengajar ternyata mereka harus

²⁸Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

ditugaskan ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Itu hambatan teknisnya namun selama ini hanya itu bisa kita tangani dan hambatannya lebih kecil dibandingkan dengan faktor pendukungnya”.²⁹

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Antara faktor pendukung dan penghambat disini lebih banyak faktor penghambatnya, karena semua pelatihan harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada”.³⁰

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa antara faktor pendukung dan faktor penghambat lebih banyak faktor pendukungnya seperti sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup.

4. Perubahan kompetensi seorang tenaga kependidikan dari hasil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan?

Dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk mengetahui keberhasilan sebuah pelatihan yang selama ini dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Setiap pelatihan ketika untuk menjelang pra akhirnya pelatihan itu ada evaluasi mas, evaluasi itu adalah secara akademik dilihat dari nilainya, jadi ada sebelum peserta itu mengikuti diklat baru pertama hadir itu ada yang namanya *pritest*, menjelang akhir diklat sebelum pulang mereka ada

²⁹Wawancara dengan Bapak AzizFuadi, S.SOS.,M.S.M selakuPenyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

³⁰Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

ujian lagi yang namanya *postestitu* nanti dilihat perbandingannya antara nilai *pritest dan postest* maka rata-rata postestnya lebih baik dari *pritest* maka secara akademik sudah meningkat nah attitude, sikap, perilaku peserta disiplin juga kita lihat ketika sudah kembali ke tempat kerjanya ketika akhir tahun kami lembaga diklat ini melakukan monitoring ke tempat kerjanya masing-masing disitu kita kasih angket dengan pimpinannya untuk memberikan penilaian bahwa peserta ini setelah diklat ada nggak peningkatan ternyata banyak lebih baik meningkat dilihat dari attitudenya, skill, keahliannya juga meningkat jadi kita melihat dari sisi skill, attitude dan knowledge jadi setelah dilakukan monitoring ternyata mereka skill, attitude dan knowledgenya itu lebih baik dari sebelum dilakukan pendiklatan”.³¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.Mselaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan beliau mengatakan:

“Jadi untuk mengetahui keberhasilan diklat itu ada proses evaluasi diklat. Jadi di dalam ketika peserta berada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya mereka juga perlu kita lakukan evaluasi. Nah evaluasi peserta itu jadi disini ada evaluasi penyelenggaraan diklat. Evaluasi penyelenggaraan diklat itu terdiri dari: pertama, evaluasi pelaksanaan diklat, evaluasi pelaksanaan diklat itu dilaksanakan pada saat penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Ketika akhir diklat peserta di evaluasi. Evaluasinya baik evaluasi sikap dan perilaku maupun evaluasi kompetensi kognitif dan skillnya. Jadi pengetahuan bertambah atau tidak, terus skillnya bertambah atau tidak, terus sikap dan perilakunya seperti apa itu tentang evaluasi. Ada biasanya evaluasi kalau untuk sikap dan perilaku dilaksanakan atau dilakukan oleh panitia penyelenggara selama peserta mengikuti diklat. Sedangkan untuk evaluasi yang bersifat pengetahuan dan skill itu ada evaluasi dari widiaiswara atau pengajar. Jadi masing-masing orang yang mengajar diklat atau masing-masing pengajar yang mengajar di diklat itu dikasih lembar evaluasi untuk peserta, di lembar evaluasi itu akan di tuliskan angka-angkanya peserta ini materi ini mendapat nilai berapa, setelah

³¹Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

terakhir itu semua dari nilai sikap, pengetahuan, dan skill. Itu nanti di hitung semua dengan rumus tertentu akhirnya diperoleh angka yang menunjukkan peserta itu kompeten atau tidak kompeten. Jadi tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah peserta diklat itu memang benar-benar mampu dalam bidangnya setelah mengikuti diklat apakah ada penumbuhan pengetahuan, keterampilan dan skill yang bisa mendukung dan fungsinya atau tidak.

Balai Diklat Keagamaan Surabaya juga mengadakan wawancara apakah peserta memang benar-benar sudah kompeten atau belum. Itu juga proses evaluasi jadi instrumen yang berupa kuesioner tadi hasilnya dan dipadukan dengan hasil wawancara selanjutnya di masing-masing daerah itu dikumpulkan akhirnya di dapatkan evaluasi akhir alumni diklat mereka dievaluasi seperti apa.apakah diklat benar benar membawa manfaat bagi peserta atau tidak.kalau misalkan tidak ada manfaat kita cari solusinya.misalnya kenapa diklatnya kok tidak berhasil bagi peserta-peserta kompetensinya kurang meningkat itu dicari selusnya kenapa peserta kok kurang meningkat kompetensinya”³².

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE.

M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Ya, dengan mengadakan evaluasi pasca diklat”³³.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa untuk mengetahui keberhasilan sebuah pelatihan yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi.

Yang dilakukan Balai Diklat Keagamaan Surabaya atau penyelenggara jika merasa tidak puas akan hasil akhir dari pelatihan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

³²Wawancara dengan Bapak AzizFuadi, S.SOS.,M.S.M selakuPenyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

³³Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana mudaBalai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

“Dari hasil evaluasi, evaluasi akhir peserta diklat kita ada tiga evaluasi yang pertama evaluasi terhadap panitia, jadi panitia itu peserta memberikan penilaian terhadap panitia tentang penyelenggaraan, yang kedua evaluasi panitia terhadap peserta bagaimana peserta selama mengikuti kegiatan disini baik dari disiplinnya, perilakunya, atau pengetahuannya itupun ada evaluasinya, yang ketiga evaluasi peserta terhadap narasumber atau widiaiswara, bagaimana widiaiswara a b c ini dalam menyampaikan materi sudah bagus nggak sudah sesuai nggak nah dari evaluasi itu maka kita lihat hasil akhirnya, nilainya sehingga dari itu kita bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Seperti narasumber nilainya kok jelek 60 kita panggil ini nilainya kamu 60 bagaimana penyampaian materinya kok dapat nilai sekian nah dari situlah nanti motivasi untuk memperbaiki dari narasumber itu”.³⁴

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku penyusun bahan siaran dan pemberitaanbeliau mengatakan:

“Jadi point keberhasilan diklat itu di dalam proses diklat itu tadi poin-poinnya itu ada sikap dan perilaku ada kompetensi pengetahuan, ada skill. Jadi ada knowledge, skill, dan attitude. Nah itu yang di nilai pada saat akhir pendiklatan. Pengetahuan apa yang dinilai, pengetahuannya tergantung pada masa diklatnya itu. Untuk keterampilannya itu yang dinilai apa, jadi yang dinilai pada keterampilan ini seperti mengerjakan tugas misalnya peserta mengerjakan tugas A, B, C, D, E nilainya seperti apa, perilaku itu tingkahlakunya seperti apa, kedisiplinannya seperti apa, keterampilannya seperti apa, dan lain-lain. Nah itu untuk sikap dan perilaku ada sekitar 10 poin”.³⁵

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE. M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

³⁴Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

³⁵Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

“Mengadakan evaluasi secara internal, untuk mengetahui dimana nilai yang rendah itu perlu ditingkatkan. Sedangkan yang sudah bagus harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi”.³⁶

Sedangkan mengenai persentase keberhasilan atau tidak selama melakukan program pelatihan terhadap tenaga kependidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muslimin selaku Kasubag TU beliau mengatakan:

“Persentasenya ya kalau berhasil 90% dan sisanya tidak berhasil. kalau persentasenya lebih besar tidak berhasil kita tidak dipercayai lagi oleh pemerintah gak dikasih anggaran lagi dianggap sia-sia pelatihan itu hanya mengajukan anggaran saja kan”.³⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan beliau mengatakan:

“Untuk selama ini untuk tenaga kependidikan ketika materinya tentang administrasi dan keuangan itu namanya diklat administrasi dan keuangan bagi biasanya bagi TU, terus administrasi dan keuangan bagi bendahara. Terus diklat persuratan dan kearsipan itu tenaga kependidikan ya? Jadi Diklat Persuratan bagi staf madrasah. Persentase keberhasilannya bisa dibilang kita sudah berhasil sudah 95% kalau di hitung. Namun tidak ada survey khusus untuk melihat

³⁶Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

³⁷Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kasubag TU Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Kamis 4 Juni, pukul 13:07

persentase khusus bagi administrasi tenaga kependidikan ini belum ada. Atau belum ada evaluasi bagi Balai Diklat Keagamaan Surabaya tadi yaitu evaluasi yang menyeluruh tidak hanya tenaga kependidikan saja yang di evaluasi namun dari seluruh alumni diklat. Namun kita bisa bilang berhasil karena rata-rata alumni diklat selama ini kompeten baik diklat untuk tenaga kependidikan maupun untuk diklat lainnya. Yang cukup kompeten itu 2% atau 1% dan sisanya sudah kompeten. Dan bisa dikatakan bahwa diklat yang di laksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama ini rata-rata berhasil”.³⁸

Begitu juga yang dikatakatan oleh Bapak Anton Sasono, SE.

M.A.B selaku perencana muda beliau mengatakan:

“Persentase keberhasilan program pelatihan mencapai 95% berhasil”.³⁹

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa persentase keberhasilan selama melaksanakan pelatihan mencapai 90%-95%.

B. Temuan Penelitian

1. Merancang program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya?
 - a) Merancang program pelatihan harus melakukan analisis kebutuhan diklat dari para *stakeholder*. Analisis kebutuhan diklat fungsinya untuk memperoleh gambaran atau untuk memperoleh sebuah analisis tentang diklat-diklat apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

³⁸Wawancara dengan Bapak Aziz Fuadi, S.SOS.,M.S.M selaku Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Senin 4 Mei, Pukul 08:23

³⁹Wawancara dengan Bapak Anton Sasono, SE.M.A.B selaku perencana muda Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Sabtu 9 Mei, pukul 08:44

- b) Merancang program pelatihan kita harus melihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan narasumber/widiaiswara, dan anggaran yang ada.
 - c) Skala prioritas dalam merancang program pelatihan adalah pelatihan yang benar-benar dibutuhkan oleh *stakeholder*.
 - d) Pihak-pihak yang terlibat dalam merancang program pelatihan adalah kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, widiaiswara, kasubag TU, kasi diklat ADM, kasi diklat tenaga teknis, dan lain-lain.
 - e) Penghambat dalam merancang program pelatihan diklat pelatihan yang dibutuhkan belum ada konsulnya dari pusat, bertentangan dengan kepentingan pengajar, dan anggaran yang terbatas.
2. Melaksanakan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya?
- a) Sebelum melaksanakan program pelatihan harus melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu.
 - b) Sering dibutuhkan dalam melaksanakan program pelatihan adalah anggaran, widiaiswara, dan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perlengkapan media, dan lain-lain.
 - c) Kendala dalam melaksanakan program pelatihan terletak pada anggaran yang sangat terbatas, juga terletak pada pengajar atau widiaiswara yang kadang kala tidak datang untuk mengisi pelatihan.

- d) Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelatihan adalah manajemen, pengajar, peserta, anggaran, dan lain sebagainya.
 - e) Faktor pendukung dan faktor penghambat lebih banyak faktor pendukungnya seperti sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup.
3. Bagaimana cara mengetahui perubahan kompetensi seorang tenaga kependidikan dari hasil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan?
- a) Mengetahui keberhasilan sebuah pelatihan yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi.
 - b) Persentase keberhasilan selama melaksanakan pelatihan mencapai 90%-95%.

C. Pembahasan

1. Rancangan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Dalam merancang program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan dengan melakukan analisis kebutuhan diklat dari para *stakeholder* untuk memperoleh sebuah analisis tentang diklat-diklat yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Dalam merancang program pelatihan juga harus melihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan narasumber/widiaiswara, dan anggaran yang ada.

Tujuan dari adanya kegiatan merancang pelatihan keahlian administrasi harus melakukan analisis kebutuhan diklat untuk

mengetahui diklat apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Sedangkan mengenai hambatan yang terjadi ketika merancang kegiatan diklat yaitu kegiatan diklat berbenturan dengan kepentingan pengajar, dan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagaimana pernyataan Mangkunegara yang dikutip dalam jurnal Rispa Ngindana menyatakan bahwa analisis kebutuhan diklat adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau sara tindakan selanjutnya. Informasi kebutuhan diklat yang dihasilkan ini akan membantu lembaga pendidikan untuk menentukan prioritas jenis diklat yang akan dilakukan, sehingga akan membantu lembaga pendidikan dalam membentuk jadwal, anggaran, dan sumber daya lainnya. Hal ini juga dapat dilakukan untuk meminimalisir diklat-diklat yang tidak diperlukan.⁴⁰

Begitu juga dengan pernyataan Sarwandi dalam Jurnal Edisi Khusus menyatakan bahwa analisis kebutuhan pelatihan dilakukan sebelum program pelatihan dirancang. Analisa kebutuhan pelatihan adalah suatu investigasi sitematis mengenai deskrepansi kinerja untuk mengembangkan kesenjangan, menetapkan mengapa itu terjadi, dan memutuskan apakah pelatihan merupakan solusi potensial.

Analisis kebutuhan pelatihan keahlian administrasi merupakan faktor yang kritis dalam mengembangkan program pelatihan yang

⁴⁰Rispa Ngindana, "Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kesenjangan Kerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto", *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 1, No. 1 (April 2019) hlm. 5.

efektif. Bila pekerjaan dianalisis dari sudut pandang yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, mengapa hal tersebut dikerjakan, atas dasar apa dan dengan kondisi yang bagaimana, maka memungkinkan dirancang mata pelatihan yang realistic untuk membekali pegawai guna melaksanakan pekerjaannya.⁴¹

2. Dalam pelaksanaan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Melaksanakan program pelatihan keahlian administrasi sebagai peningkatan kompetensi manajerial tenaga kependidikan bahwa sebelum melaksanakan program pelatihan harus melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu. Rapat persiapan diklat ini diikuti oleh panitia penyelenggara, pengelola diklat dan widiaiswara. Dalam melaksanakan program pelatihan yang sering dibutuhkan adalah anggaran, widiaiswara, dan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perlengkapan media, dan lain-lain.

Tujuan dari adanya pelaksanaan pelatihan keahlian administrasi untuk memberikan pengetahuan baru, pelatihan baru pada peserta diklat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta. Sedangkan mengenai hambatan dari pelaksanaan diklat yaitu keterbatasan anggaran, pengajar yang kadangkala tidak datang ke tempat pelatihan.

Sebagaimana pernyataan Syukur menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk

⁴¹Sarwandi, Kajian Hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Dinas Perhubungan Pada Kantor Diklat Transportasi Darat Bekasi, *Edisi Khusus*, No. 1, (Agustus 2011), hlm. 212.

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁴²

Dalam pelaksanaan diklat harus ada rapat terlebih dahulu mengenai persiapan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat. Berapa anggaran yang dibutuhkan, siapa widiaiswara/pematerinya, dan bagaimana perlengkapan sarana prasarannya.

Sebagaimana pernyataan Eri Sopyanti Herlina dalam Jurnal *Adpend* menyatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan pelatihan sasaran yang dituju yaitu akomodasi diklat, perlengkapan yang dibutuhkan saat diklat, penyelenggara diklat, biaya operasional apakah telah mendukung proses belajar mengajar sehingga mencapai tujuan pelatihan yang telah dijabarkan dalam silabus serta menjamin kelancaran proses belajar mengajar.⁴³

Setelah mengetahui semua apa yang diperlukan sebelum melaksanakan diklat maka akan menjamin dalam kelancaran proses

⁴²Awalien Dhea Syafitrie, "Pelatihan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta", hlm. 15.

⁴³Eri Sopyanti Herlina, "Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan terhadap Prestasi Kerja Pegawai", *Jurnal Adpend*, hlm.58.

belajar mengajar sehingga tujuan dari adanya pelatihan akan tercapai dengan maksimal.

3. Perubahan kompetensi seorang tenaga kependidikan dari hasil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.

Dengan mengetahui perubahan atau keberhasilan kompetensi manajerial seorang tenaga kependidikan dari hasil kegiatan pelatihan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan kegiatan evaluasi. Dan persentase keberhasilan selama melaksanakan pelatihan mencapai 90%-95%.

Tujuan dari adanya evaluasi pelatihan adalah untuk mengetahui sejauhmana peserta pelatihan memahami dan menguasai materi pelatihan serta untuk melihat keberhasilan dari pemateri dalam mengajar atau melatih peserta pelatihan.

Dengan adanya pelatihan tenaga kependidikan bisa mengetahui bagaimana cara menjadi tenaga kependidikan yang professional, bisa memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja serta bisa meningkatkan mutu tenaga kependidikan.

Kompetensi manajerial adalah kemampuan seorang tenaga pendidikan dalam mengatur, mengelola dan menggerakkan para bawahan tenaga administrasi sekolah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya maupun masyarakat luar sekolah sebagai pengguna jasa sekolah sehingga akan tercapai tujuan lembaga pendidikan.

Sebagaimana pernyataan Eri Sopyanti Herlina dalam jurnal *Adpend* menyatakan bahwa kegiatan evaluasi dalam suatu pelatihan dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau keefektifan suatu program yang dilaksanakan yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi kelompok terkait dalam melakukan pelatihan selanjutnya. Dengan adanya evaluasi diklat yang dimulai dari sejak awal perencanaan program diklat, pada saat pelaksanaan diklat berlangsung, sampai pada selesainya keseluruhan program diklat. Proses evaluasi diklat akan berhasil jika proses diklat secara keseluruhan berjalan dengan baik, mulai dari tahap awal sampai dengan berakhirnya proses kegiatan belajar mengajar.⁴⁴

Begitu juga pernyataan S. Eko Putro Widoyoko menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Dalam melakukan evaluasi, evaluator pada tahap awal harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan apa yang akan dievaluasi yang secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi, serta adanya perencanaan bagaimana melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data, menganalisis dan membuat interpretasi terhadap data yang terkumpul serta membuat laporan. Selain itu, evaluator juga harus melakukan pengaturan terhadap

⁴⁴Eri Sopyanti Herlina, "Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan terhadap Prestasi Kerja Pegawai", *Jurnal Adpend*, hlm.57-58.

evaluasi dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam melaksanakan evaluasi secara keseluruhan.⁴⁵

⁴⁵S. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pelatihan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.